



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.140/M.PPN/HK/10/2022
TENTANG
PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2022**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak;
- b. bahwa untuk menetapkan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Data Prioritas Tahun 2022 dengan melibatkan Walidata Kementerian/Lembaga, Pembina Data, dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Data Prioritas Tahun 2022.
- KEDUA : Data Prioritas Tahun 2022 memuat Data yang meliputi:
- a. Data Statistik;
 - b. Data Spasial; dan
 - c. Data Keuangan Negara tingkat pusat.
- KETIGA : Data Prioritas Statistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a didasarkan pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
 - d. Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - e. Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi;
 - f. Data Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - g. usulan Walidata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Data Prioritas Spasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b didasarkan pada:
- a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - b. Data Kebijakan Satu Peta; dan

c. usulan ...

- c. usulan Walidata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Data Prioritas Keuangan Negara tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c didasarkan pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);
 - b. Usulan Walidata berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Data Prioritas Tahun 2022 memuat Produsen Data untuk masing-masing Data, dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- KETUJUH : Data Prioritas Tahun 2022 dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Data Prioritas Tahun 2022 memuat rincian yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Pembina Data.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022, dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 140/M.PPN/HK/10/2022
TANGGAL 19 OKTOBER 2022

DATA PRIORITAS TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

Lampiran Data Prioritas Tahun 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
1	Persentase keluarga yang berwirausaha	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
3	Indeks Karakter Remaja	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kedepuitan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kedepuitan Bidang Pengendalian Penduduk	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
7	Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:2000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019
8	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Klimatologi	5 Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
9	Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Klimatologi	5 Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
10	Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
11	Peta Anomali Bouguer Indonesia skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
12	Peta Klimatologis Angin dan Tinggi Gelombang	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Meteorologi	Harian	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
13	Peta Percepatan Tanah Maksimum pada Batuan Dasar	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
14	Peta Percepatan Tanah Maksimum Permukaan	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Ad Hoc	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
15	Peta Posisi Ketinggian Hilal Indonesia Bulanan skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
16	Peta Proyeksi Perubahan Iklim skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Klimatologi	Ad Hoc	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
17	Peta Variasi Medan Magnet Bumi Indonesia skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
18	Peta Wilayah Waktu Indonesia skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012
19	Peta Episentris Gempa Bumi	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Ad Hoc	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
20	Peta Peringatan Dini Tsunami	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Ad Hoc	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
21	Peta Sambaran Petir Indonesia skala 1:250.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. PP No. 46 Tahun 2012; 3. Perka BMKG No. 20 Tahun 2015
22	Indeks risiko bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Tahunan	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
23	Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Tahunan	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
24	Jumlah fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
25	Jumlah fasilitas pendidikan yang hancur akibat bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
26	Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
27	Jumlah fasilitas kesehatan yang hancur akibat bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
28	Jumlah penduduk yang meninggal dunia dan hilang akibat bencana, per seratus ribu penduduk	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
29	Jumlah penduduk yang luka / sakit akibat bencana, per seratus ribu penduduk	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
30	Jumlah penduduk yang rumahnya rusak akibat bencana, per seratus ribu penduduk	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
31	Jumlah penduduk yang rumahnya hancur akibat bencana, per seratus ribu penduduk	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pengendalian Operasi	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
32	Persentase pemerintah daerah yang memiliki strategi penanggulangan bencana yang selaras dengan rencana / strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
33	Peta Sebaran Kecelakaan Penanganan Khusus	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Bulanan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
34	Peta Sebaran Kecelakaan Kapal	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Bulanan	Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2020
35	Peta Sebaran Kecelakaan Pesawat	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Bulanan	Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2020
36	Peta Sebaran Kondisi yang Membahayakan Jiwa Manusia	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Bulanan	Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2020
37	Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Tahunan	Peraturan BNPP No. 5 Tahun 2021
38	Peta Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi	Tahunan	Peraturan BNPP No. 5 Tahun 2021
39	Monitoring Stok Pangan Strategis (Penggilingan/Pedagang)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Mingguan	1. Perpres No. 66 Tahun 2021; 2. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
40	Stok Pangan Strategis Nasional (BUMN Pangan)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Harian	1. Perpres No. 66 Tahun 2021; 2. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
41	Data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Harian	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
42	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Mingguan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
43	Data Stok pada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)/ Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Mingguan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
44	Database Keamanan Pangan Segar (OKKP)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bulanan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
45	Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Produsen dan Konsumen	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Harian	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
46	Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
47	Perkembangan Konsumsi Pangan (Skor PPH)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tahunan	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. Perpres No. 66 Tahun 2021; 3. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
48	Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Bulanan	1. UU No. 18 Tahun 2012; 2. Perpres No. 83 Tahun 2017; 3. Perpres No. 66 Tahun 2021; 4. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
49	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Tahunan	1. UU No. 18 Tahun 2012; 2. PP No. 17 Tahun 2015; 3. Perpres No. 66 Tahun 2021; 4. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
50	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Tahunan	1. UU No. 18 Tahun 2012; 2. PP No. 17 Tahun 2015; 3. Perpres No. 66 Tahun 2021; 4. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
51	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Badan Pangan Nasional	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Bulanan	1. UU No. 18 Tahun 2012; 2. PP No. 17 Tahun 2015; 3. Perpres No. 66 Tahun 2021; 4. Perka Bapanas No. 2 Tahun 2022
52	Indeks Kesulitan Geografis	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketahanan Wilayah	Tahunan	IKG digunakan sebagai salah satu alokator dana desa
53	Banyaknya usaha/perusahaan hortikultura menurut provinsi dan jumlah pekerja	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Hortikultura	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
54	Volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kehutanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
55	Volume produksi kayu bulat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kehutanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
56	Volume produksi kayu olahan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kehutanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
57	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
58	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
59	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	5 Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
60	Food Insecurity Experience Scale/FIES	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
61	Harapan lama sekolah	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
62	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
63	IDI Aspek Kebebasan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
64	IDI Aspek Kesetaraan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
65	Indeks Balas Jasa dan Upah Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
66	Indeks Demokrasi Indonesia	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
67	Indeks Hari-Orang (Mandays) Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
68	Indeks Nilai Konstruksi yang Diselesaikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
69	Indeks Pekerja Tetap Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
70	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
71	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
72	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
73	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
74	IPM Provinsi di Wilayah Maluku	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
75	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
76	IPM Provinsi di Wilayah Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
77	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
78	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Analisis Statistik	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
79	Jumlah Balas Jasa dan Upah Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
80	Jumlah Hari-Orang (Mandays) Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
81	Jumlah Nilai Konstruksi yang Diselesaikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
82	Jumlah Pekerja Tetap Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
83	Jumlah Perusahaan Peternakan Sapi Perah Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
84	Jumlah Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
85	Jumlah Perusahaan Peternakan Unggas Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
86	Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH dan Di Luar RPH yang Dilaporkan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
87	Jumlah Ternak yang dipotong di rumah potong hewan (RPH) menurut Provinsi dan Jenis Ternak	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
88	Kontribusi PDB industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
89	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
90	Kontribusi PDB pariwisata	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
91	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
92	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
93	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
94	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
95	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
96	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
97	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
98	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
99	Nilai Tukar Petani (NTP)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Harga Pedesaan	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
100	Penyediaan lapangan kerja per tahun	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
101	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
102	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	10 Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
103	Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	3 Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
104	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
105	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
106	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
107	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
108	Persentase persalinan di fasyankes (%)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
109	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
110	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
111	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
112	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
113	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
114	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ekspor	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
115	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	Badan Pusat Statistik	Fungsi Neraca Modal dan Luar Negeri	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
116	Pertumbuhan investasi (PMTB)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Neraca Modal dan Luar Negeri	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
117	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
118	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
119	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha per Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
120	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
121	Prevalence of Undernourishment/ PoU	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
122	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
123	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
124	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
125	Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
126	Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
127	Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
128	Volume produksi ikan di perusahaan budidaya ikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Perikanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
129	Volume produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Perikanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
130	Indeks Kemahalan Konstruksi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Harga Perdagangan Besar	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
131	Indeks Harga Konsumen	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Harga Konsumen	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
132	PDRB Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
133	PDRB Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
134	PDRB Wilayah Maluku	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
135	PDRB Wilayah Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
136	PDRB Wilayah Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
137	PDRB Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
138	PDRB Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
139	Distribusi PDRB Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
140	Distribusi PDRB Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
141	Distribusi PDRB Wilayah Maluku	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
142	Distribusi PDRB Wilayah Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
143	Distribusi PDRB Wilayah Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
144	Distribusi PDRB Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
145	Distribusi PDRB Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
146	Laju Implisit PDRB Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
147	Laju Implisit PDRB Wilayah Kalimantan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
148	Laju Implisit PDRB Wilayah Maluku	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
149	Laju Implisit PDRB Wilayah Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
150	Laju Implisit PDRB Wilayah Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
151	Laju Implisit PDRB Wilayah Sulawesi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
152	Laju Implisit PDRB Wilayah Sumatera	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
153	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha per Kab/Kota	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
154	Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha per Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
155	Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha per Kab/Kota	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
156	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha per Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
157	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha per Kab/Kota	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
158	PDRB Menurut Lapangan Usaha per Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
159	PDRB Menurut Lapangan Usaha per Kab/Kota	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
160	Pertumbuhan PDB pertanian	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
161	Jumlah Perusahaan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
162	Banyaknya Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
163	Banyaknya Pengeluaran untuk Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
164	Perubahan Modal Tetap Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
165	Total Nilai Output Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
166	Total Biaya Input Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
167	Nilai Tambah (Harga Pasar) Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
168	Pajak Tidak Langsung Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
169	Nilai Tambah (Biaya Faktor Produksi) Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
170	Rincian Nilai Output Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
171	Rincian Biaya Input Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
172	Indeks Produksi Bulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
173	Indeks Produksi Triwulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
174	Pertumbuhan Produksi Bulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
175	Pertumbuhan Produksi Triwulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Besar dan Sedang	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
176	Produksi Cabai dan Bawang di Indonesia	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Hortikultura	tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
177	Banyaknya Pekerja Dirinci Atas Pendidikan dan Kewarganegaraan pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
178	Balas Jasa Pekerja Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
179	Nilai Output Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
180	Biaya Antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
181	Nilai Output Menurut Jenis Kegiatan Utama Perusahaan Mineral dan Batubara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
182	Biaya Antara pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
183	Banyaknya Pekerja dirinci menurut Tingkat Pendidikan dan Kewarganegaraan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
184	Balas Jasa Pekerja pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
185	Produksi Tahunan (Tahun Kalender) Menurut Jenis Bahan Tambang	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
186	Banyaknya Usaha/Perusahaan Penggalian	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
187	Banyaknya Pekerja Usaha/Perusahaan Penggalian	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
188	Balas Jasa Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Penggalian	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
189	Volume Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
190	Nilai Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
191	Jumlah Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
192	Tenaga Listrik Yang Dibangkitkan Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
193	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
194	Banyaknya Energi Listrik Yang Didistribusikan Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
195	Banyaknya Pekerja Perusahaan Gas Menurut Tingkat Pendidikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
196	Balas Jasa Pekerja Perusahaan Gas Menurut Jenis Balas Jasa	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
197	Volume Penjualan Gas Menurut Jenis Pelanggan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
198	Nilai Penjualan Gas Menurut Jenis Pelanggan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
199	Nilai Output dan Biaya Antara Perusahaan Gas	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
200	Jumlah Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
201	Jumlah Pekerja Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
202	Balas Jasa Pekerja Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
203	Volume Air Bersih Yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
204	Nilai Air bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
205	Rata-rata Pemakaian Listrik Berlangganan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
206	Rata-rata Produksi Listrik Yang Dibangkitkan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
207	Persentase Perilaku Perusahaan/Unit Usaha Dalam Penggunaan Listrik	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
208	Luas Panen dan Produksi Padi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Tanaman Pangan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
209	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
210	Persentase penduduk miskin Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
211	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku dan Papua	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
212	Indeks Desa	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketahanan Wilayah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022;
213	Indikator Produksi Subsektor Perkebunan Potensi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Perkebunan	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. PDB
214	Ter-update Dashboard Updating Usaha Pertanian sektor Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. PDB
215	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pariwisata	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. PDB; 4. Tourism Satellite Account (TSA)
216	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pariwisata	Bulanan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. PDB; 4. Tourism Satellite Account (TSA)
217	Neraca Aset Lingkungan (Neraca Sumberdaya Alam)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2023
218	Neraca Arus Energi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2023
219	Neraca emisi Gas Rumahkaca (GRK)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Regional	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2023
220	Persentase kemiskinan tingkat kabupaten	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
221	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
222	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
223	Pertumbuhan wirausaha	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
224	Rasio kewirausahaan nasional	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
225	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
226	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
227	Peta Kota Inflasi skala 1:100.000	Badan Pusat Statistik	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Bulanan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
228	Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000	Badan Pusat Statistik	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
229	Peta Statistik Indonesia skala 1:100.000	Badan Pusat Statistik	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
230	Peta Wilayah Kerja Statistik skala 1:10.000	Badan Pusat Statistik	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
231	Banyaknya Usaha, dan Jumlah Pekerja Usaha Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
232	Banyaknya Usaha, Pekerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Provinsi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
233	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Jenis Kesulitan,	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
234	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Kelompok Pekerja	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
235	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Kelompok Umur Pengusaha	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
236	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Sumber Modal	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
237	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
238	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Provinsi dan Kelompok Pekerja	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
239	Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil yang Memanfaatkan Pinjaman menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
240	Direktori Perusahaan Konstruksi Skala Kecil	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
241	Direktori Perusahaan Konstruksi Skala Menengah	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
242	Direktori Usaha Konstruksi Skala Perorangan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	3 Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
243	Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Kecil	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
244	Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Menengah	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
245	Jumlah Usaha Konstruksi Skala Perorangan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Konstruksi	3 Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
246	Sensus Ekonomi	Badan Pusat Statistik	Direktorat Statistik Distribusi	10 Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
247	Jumlah Wisatawan Nasional	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pariwisata	Tahunan	Tourism Satellite Account (TSA)
248	Jasa Pariwisata (Perhotelan, Restoran, dll)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pariwisata	Bulanan	1. Tourism Satellite Account (TSA); 2. PDB
249	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
250	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	5 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
251	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	5 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
252	Angka Kematian Ibu (AKI)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	5 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
253	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Demografi	10 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
254	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
255	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
256	Indikator anomali harga pangan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Harga Konsumen	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
257	Jumlah Desa Mandiri.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketahanan Wilayah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
258	Jumlah desa tertinggal.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketahanan Wilayah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
259	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ekspor	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
260	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Triwulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
261	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	Konsolidasi Neraca Pengeluaran	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
262	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Indikator Statistik	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
263	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Indikator Statistik	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
264	PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	Konsolidasi Neraca Pengeluaran	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
265	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
266	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
267	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Lingkungan Hidup	3 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
268	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
269	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
270	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
271	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
272	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ekspor	Bulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
273	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
274	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Pusat Statistik	Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
275	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
276	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
277	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
278	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
279	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
280	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Badan Pusat Statistik	Statistik Kerawanan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
281	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
282	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
283	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Politik dan Keamanan	3 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
284	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
285	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Rumah Tangga	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
286	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
287	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Lingkungan Hidup	3 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
288	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
289	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
290	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
291	Tingkat kemiskinan ekstrem	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kerawanan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
292	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
293	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
294	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
295	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kesehatan dan Perumahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
296	Upah rata-rata per jam pekerja.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
297	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Kereta Api	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Transportasi	Bulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
298	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Kapal Pelayaran Dalam Negeri	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Transportasi	Bulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
299	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Transportasi	Bulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
300	Jumlah bandara yang aktif beroperasi	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Transportasi	Bulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
301	Volume produksi per hari dari produsen makanan (petani) skala kecil atau Small Scale Food Producer menurut kelas pertanian/ ladang penggembalaan/ ukuran perusahaan kehutanan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
302	Rata-rata pendapatan produsen makanan (petani) skala kecil atau Small Scale Food Producer menurut jenis kelamin dan status adat	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	3 tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
303	Proporsi lahan pertanian yang pengelolaannya di bawah batas kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Kehutanan	3 tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
304	Presentase penduduk dengan kepemilikan atau hak yang terjamin atas lahan pertanian (dari total populasi pertanian), berdasarkan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	3 tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
305	Komposisi pengelola perempuan atau pemegang hak atas lahan pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Peternakan	3 tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
306	Persentase setengah pengangguran.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
307	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
308	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik	Fungsi Statistik Ketenagakerjaan	Semesteran	1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 2. RPJMN 2020-2024; 3. Rencana Kerja Pemerintah 2022
309	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
310	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
311	Ada tidaknya Perda/SK Bupati terkait pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penerangan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
312	Ada tidaknya SOP/ Peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di kabupaten	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
313	List kabupaten yang mengoperasikan SP4N Laport	Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penerangan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
314	Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
315	Peta Sumber Daya Mineral skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
316	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Perpres No. 2 Tahun 2022
317	Jumlah Badan pada Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas yang dibina dan diawasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Triwulanan	Perpres No. 2 Tahun 2022
318	Jumlah Badan Usaha Kegiatan Pemproduksi pada sumur tua	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
319	Jumlah Badan Usaha yang diawasi Kegiatan Usaha Pengangkutan Migasnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Triwulanan	Perpres No. 2 Tahun 2022
320	Jumlah energi yang disalurkan kepada industri kecil dengan daya 450VA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
321	Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Semesteran	Perpres No. 2 Tahun 2022
322	Jumlah perizinan di bidang jasa usaha pertambangan yang dikeluarkan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Bulanan	Perpres No. 2 Tahun 2022
323	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
324	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
325	Jumlah Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
326	Jumlah usaha yang dibina subsektor mineral dan batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Bulanan	Perpres No. 2 Tahun 2022
327	Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
328	Peta Geologi skala 1: 100.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
329	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
330	Peta Kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
331	Peta KRB Gempa Bumi skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
332	Peta KRB Tsunami skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
333	Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
334	Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
335	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
336	Peta Perizinan berusaha di bidang pertambangan skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Bulanan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
337	Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
338	Jumlah Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
339	Jumlah Pengguna Listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
340	Jumlah Produksi Tenaga Listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
341	Kapasitas terpasang pembangkit EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
342	Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
343	Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
344	Porsi EBT dalam bauran energi nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Triwulanan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
345	Peta Geologi skala 1:100.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
346	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
347	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
348	Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
349	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
350	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
351	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
352	Peta Kerentanan Likuefaksi skala 1:100.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
353	Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Ad Hoc	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
354	Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:1.000.000 untuk lima pulau besar seluruh Indonesia, dan skala 1:100.000 untuk kota besar	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
355	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LP Gas skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
356	Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
357	Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Semesteran	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
358	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
359	Jumlah penerima Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSH)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Triwulanan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
360	Jumlah penerima subsidi listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
361	Kuota LPG 3 KG	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Bulanan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
362	Realisasi penjualan LPG 3 KG	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Bulanan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
363	Bauran energi terbarukan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Triwulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
364	Intensitas energi primer (SBM/MiliarRupiah)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Triwulanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
365	Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
366	Kualitas air tanah sebagai air baku	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
367	Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000	Kementerian Perindustrian	Direktorat Perwilayahan Industri	Ad Hoc	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
368	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 4. Permenkumham No. 6 Tahun 2013
369	Jumlah paten granted (domestik)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Tahunan	Perpres No. 115 Tahun 2021
370	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI Domestik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Tahunan	Perpres No. 115 Tahun 2021
371	Data Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Tahunan	UU No. 16 Tahun 2012
372	Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Tahunan	UU No. 16 Tahun 2012
373	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang dilindungi/ Genetik Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Tahunan	Kepmen KKP No. 1 Tahun 2021
374	Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	5 Tahunan	Kepmen KKP No. 119 Tahun 2021
375	Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Tahunan	Kepmen KKP No. 19 Tahun 2022
376	Laboratorium Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Pengendalian Mutu	5 Tahunan	Kepmen KKP No. 21 Tahun 2019
377	Jenis Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	5 Tahunan	Kepmen KKP No. 37 Tahun 2021
378	Kelompok Masyarakat Pengawas	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Kepmen KKP No. 58/KEPMEN-KP/2001
379	Alat Penangkapan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	5 Tahunan	Kepmen KKP No. 89 Tahun 2021
380	Obat Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	5 Tahunan	Permen KKP No. 1 Tahun 2019
381	Penyakit Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	5 Tahunan	Permen KKP No. 13 Tahun 2021
382	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5 Tahunan	Permen KKP No. 22 Tahun 2021
383	Perizinan Reklamasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jasa Kelautan	Tahunan	Permen KKP No. 25 Tahun 2019
384	Luas Kawasan Konservasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Tahunan	Permen KKP No. 31 Tahun 2020
385	Data Intrusi Kapal Ikan Asing	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Permen KKP No. 4 Tahun 2021
386	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	5 Tahunan	Permen KKP No. 42 Tahun 2019
387	Pakan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	5 Tahunan	Permen KKP No. 55 Tahun 2018
388	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
389	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
390	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
391	Jumlah Produksi Garam	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jasa Kelautan	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
392	Angka Konsumsi Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
393	Harga Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran	Mingguan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
394	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
395	Nilai Tukar Produk Hasil Perikanan (NTPHP)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Permen KKP No. 57 Tahun 2020
396	Kapal Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Tahunan	Permen KKP No. 58 Tahun 2020
397	Perizinan Usaha Penangkapan Ikan dan Kapal Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	Tahunan	Permen KKP No. 58 Tahun 2020
398	Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017
399	Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
400	Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017
401	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Geologi	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
402	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017
403	UPT lingkup Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017
404	Perizinan Pulau	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Tahunan	Permen KKP No. 8 Tahun 2019
405	Instalasi Karantina Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Karantina Ikan	5 Tahunan	Permen KKP No. 9 Tahun 2019
406	Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
407	Peta Lahan Garam	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jasa Kelautan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
408	Peta Lahan Pembudidayaan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
409	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
410	Peta Izn Lokasi di Laut dan Peta Perizinan Berusaha terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
411	Peta Izn Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
412	Peta Rencana Tata Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
413	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
414	Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
415	Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
416	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
417	Peta Potensi Sumber Daya Arkeologi Maritim	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Riset Kelautan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
418	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Riset Kelautan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
419	Peta Kerentanan Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Riset Kelautan	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
420	Neraca Komoditas	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Logistik	Tahunan	Perpres No. 32 tahun 2022
421	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan, dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha tahun berjalan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Tahunan	Perpres No. 59 Tahun 2017
422	Toponimi Pulau	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	PP No. 2 Tahun 2021
423	Pelabuhan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5 Tahunan	PP No. 27 Tahun 2021
424	Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	5 Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
425	Peta Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jasa Kelautan	5 Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
426	Peta Sebaran Biota Laut Dilindungi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	5 Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
427	Komoditas Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang Dilalulintaskan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Karantina Ikan	Tahunan	UU No. 21 Tahun 2019
428	Penetapan Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Tahunan	UU No. 27 Tahun 2007
429	Asuransi Nelayan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	Tahunan	UU No. 7 Tahun 2016
430	Jumlah Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Skala Kecil yang Menerima Bantuan Premi Asuransi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Tahunan	1. UU No. 7 Tahun 2016; 2. Permen KKP No. 18 Tahun 2016
431	Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
432	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
433	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
434	Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	5 Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
435	Data Lowongan pekerjaan terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Pusat Pasar Kerja	Bulanan	1. Permenaker No. 39 Tahun 2016; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021
436	Data Pencari kerja terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Pusat Pasar Kerja	Bulanan	1. Permenaker No. 39 Tahun 2016; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021
437	Data Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Pusat Pasar Kerja	Bulanan	1. Permenaker No. 39 Tahun 2016; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021
438	Data Tenaga Kerja Tersertifikasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi	Triwulanan	1. Perpres No. 68 Tahun 2022; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021
439	Data Lembaga Pelatihan Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Semesteran	1. Perpres No. 68 Tahun 2022; 2. Permenaker No. 17 Tahun 2016
440	Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Triwulanan	1. Perpres No. 68 Tahun 2022; 2. Permenakertrans No. 8 Tahun 2014
441	Data Peserta Pemagangan Luar Negeri	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Triwulanan	1. Perpres No. 68 Tahun 2022; 2. Permenaker No. Per.08/MEN/V/2008
442	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Triwulanan	1. Perpres No. 68 Tahun 2022; 2. Perpres No. 6 Tahun 2020
443	Data Lembaga K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tahunan	1. PP No. 50 Tahun 2012; 2. Permenaker No. 11 Tahun 2021
444	Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Triwulanan	1. UU No. 7 Tahun 1981; 2. Permenaker No. 18 Tahun 2017
445	Data Calon PMI yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Triwulanan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
446	Data lembaga pengawasan di Pusat (Direktorat Teknis) dan Daerah (Korwil, Satwasker, UPTD)	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Tahunan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
447	Data Perusahaan yang Disidik	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Triwulanan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
448	Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas	Triwulanan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
449	Jumlah Calon Wirausaha hasil binaan TKM yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis/pendampingan	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Triwulanan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
450	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Triwulanan	Permenaker No. 11 Tahun 2021
451	Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Triwulanan	Permenaker No. 2 Tahun 2016
452	Jumlah perusahaan yang berperan memperkerjakan penyandang disabilitas	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Permenaker No. 21 tahun 2020
453	Data Perusahaan Jasa K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Semesteran	Permenaker No. Per.04/Men/1995
454	Data MOU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Tahunan	Perpres No. 59 Tahun 2017
455	Data Informasi Jabatan	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Tahunan	Perpres No. 68 Tahun 2022
456	Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Triwulanan	PP No. 50 Tahun 2012
457	Data Peserta BPJS ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Tahunan	UU No. 24 Tahun 2011

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
458	Jumlah perusahaan yang mendapatkan uji K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Triwulanan	UU No. 7 Tahun 1981
459	APBD tingkat kabupaten	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
460	APBD untuk keberlanjutan/ lingkungan hidup	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
461	Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik Negara (BMN) minimal skala 1:50.000	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Bulanan	Perpres No. 23 Tahun 2021
462	Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya di bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
463	Imbal hasil (yield) surat berharga negara	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Harian	Rencana Kerja Pemerintah 2022
464	Data UMKM binaan Kemenkop UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Deputi Bidang Kewirausahaan	Tahunan	1. Tematik Program Strategis Nasional : UMKM; 2. Buku Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM
465	Data BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Deputi Bidang Usaha Mikro	Tahunan	1. UU No. 17 Tahun 2003; 2. Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
466	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
467	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
468	Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahunan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
469	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
470	List Kabupaten yang memiliki dokumen DDDTLH kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
471	List Kabupaten yang memiliki dokumen RPPLH kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
472	Luas area kebakaran hutan dan lahan di kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
473	Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
474	Total hutan produksi di kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
475	Progres Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tahunan	Buku Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020, Dit. PDLKWS, KLHK
476	Jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri yang kompeten dan bersertifikat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
477	Jumlah lulusan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bulanan	Perpres No. 2 Tahun 2022
478	Jumlah Pembentukan Lembaga Pelatihan Pemangangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
479	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi/pemilikan legalitas kayu	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
480	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi Gold/Platinum	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Semesteran	Perpres No. 2 Tahun 2022
481	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemangangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
482	Rencana Kerja/Pengelolaan Perhutanan Sosial yang disahkan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Semesteran	Perpres No. 2 Tahun 2022
483	Jumlah Standar Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diproduksi BSILHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tahunan	PP No. 34 Tahun 2018
484	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengurangan Sampah; Direktorat Penanganan Sampah	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
485	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
486	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolaan hasil hutan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
487	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
488	Peta Indikator Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
489	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
490	Data Daftar Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
491	Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolaan hasil hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
492	Indeks tutupan hijau pegunungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
493	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
494	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolaan hasil hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
495	Jumlah KPHL yang masuk Kategori KPHL Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
496	Jumlah KPHP yang masuk Kategori KPHP Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
497	Jumlah penanganan kasus ilegal Logging	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana; Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
498	Jumlah penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana; Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan; Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi; Direktorat Penyelesaian Sengketa	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
499	Jumlah penanganan kasus Pencemaran / Perusakan Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana; Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi; Direktorat Penyelesaian Sengketa	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
500	Jumlah penanganan kasus Perambahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana; Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
501	Jumlah penanganan kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana; Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
502	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolahan hasil hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
503	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolahan hasil hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
504	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
505	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengurangan Sampah; Direktorat Penanganan Sampah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
506	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
507	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
508	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
509	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
510	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat pemulihan kerusakan lahan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
511	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengelolaan B3	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
512	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
513	Persentase sampah nasional yang terkelola	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengurangan Sampah; Direktorat Penanganan Sampah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
514	Persentase sisa makanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengurangan Sampah; Direktorat Penanganan Sampah	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
515	Presentase penurunan sampah terbang ke laut	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
516	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
517	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan/lahan kritis	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
518	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
519	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
520	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; Direktorat bina pemasaran dan pengelolahan hasil hutan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
521	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications (didiskusikan lagi dengan seknas SDGs)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	2 Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
522	Data UMKM binaan KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Tahunan	1. Tematik Program Strategis Nasional : UMKM; 2. Buku Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM
523	Data UMKM binaan Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Direktorat Manajemen Industri	Tahunan	1. Tematik Program Strategis Nasional : UMKM; 2. Buku Sistem Informasi Data Tunggal UMKM: Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis Data UMKM
524	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Data dan Informasi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
525	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Data dan Informasi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
526	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Data dan Informasi	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
527	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	5 Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
528	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Perlindungan Khusus Anak	5 Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
529	Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Data dan Informasi	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
530	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Data dan Informasi	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
531	Data Peserta Pameran Pilot Proyek Sentra Pemberdayaan Pemuda bidang Teknologi Tepat Guna	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
532	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
533	Pemuda yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Toleransi dan Moderasi Beragama	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022
534	Provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam Pilot Proyek Sentra Pemberdayaan Pemuda berbasis IPTEK	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 3. Perpres No. 43 tahun 2022; 4. Permenpora No. 32 Tahun 2016; 5. Permenpora No. 1 Tahun 2018
535	Jumlah pengelola/wirusaha industri olahraga yang mendapat pengetahuan/bimtek tentang industri olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
536	Jumlah provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
537	Jumlah SKP yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
538	Meningkatnya Jumlah SKP	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
539	Tersusunnya laporan hasil perbaikan ekosistem Kewirausahaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
540	Tersusunnya NSPK pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
541	Wirusaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
542	Lembaga Kepemudaan yang Terfasilitasi Bantuan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Tahunan	RPJMN 2020-2024
543	Lembaga Kepemudaan yang Terfasilitasi Bantuan Pembentuk Kelompok Pemuda Anti Narkoba	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Tahunan	RPJMN 2020-2024
544	Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Faham Radikalisme	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Tahunan	RPJMN 2020-2024
545	Provinsi dengan Wawasan Pemuda yang Meningkatkan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Tahunan	RPJMN 2020-2024
546	Sport Development Index (SDI)	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kepemudaan dan Penghargaan Olahraga	Tahunan	RPJMN 2020-2024

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
547	Jumlah Pemuda Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Tenaga Kepemudaan Formal/Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Tingkat Akhir	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
548	Jumlah Yayasan/Lembaga Penerima Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
549	Jumlah Yayasan/Lembaga/Pemuda Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
550	Data Peserta Program Wirausaha Muda Berprestasi (Grand Finalis)	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
551	Data Peserta Program Wirausaha Muda Pemula	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : UMKM
552	Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kepelabuhanan	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
553	Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Bandar Udara	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
554	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Bandar Udara	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
555	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
556	Peta Sebaran Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Penyeberangan skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
557	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kepelabuhanan	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
558	Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kenavigasian	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
559	Jumlah bandara baru yang dibangun	Kementerian Perhubungan	Direktorat Bandar Udara	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
560	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
561	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kepelabuhanan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
562	Jumlah rute jembatan udara	Kementerian Perhubungan	Direktorat Angkutan Udara	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
563	Jumlah rute subsidi tol laut	Kementerian Perhubungan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
564	Jumlah lokasi yang menerapkan sistem angkutan umum massal	Kementerian Perhubungan	Direktorat Angkutan Jalan	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
565	Persentase Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Kementerian Perhubungan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
566	Panjang jaringan KA yang terbangun	Kementerian Perhubungan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
567	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara (%)	Kementerian Perhubungan	Direktorat Angkutan Udara	Semesteran	Rencana Kerja Pemerintah 2022
568	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	Kementerian Perhubungan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
569	Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kenavigasian	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
570	Peta Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
571	Peta Ruang Udara skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Navigasi Penerbangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
572	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan; Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
573	Peta Sebaran Pelabuhan Danau skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
574	Peta Sebaran Pelabuhan Sungai skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
575	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kepelabuhanan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
576	Peta Sebaran Stasiun Radio Pantai (SROP) skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kenavigasian	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
577	Peta Sebaran Terminal Barang skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
578	Peta Sebaran Titik Halte Sungai-Danau skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
579	Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
580	Peta Sebaran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
581	Peta Sebaran Vessel Traffic Service (VTS) skala 1:50.000	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kenavigasian	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
582	Jumlah bandara	Kementerian Perhubungan	Direktorat Bandar Udara	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
583	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
584	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Kementerian Perhubungan	Direktorat Angkutan Jalan; Direktorat TSDP; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; Direktorat Kepelabuhanan; Direktorat Angkutan Udara; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
585	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Semesteran	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
586	Jumlah penggunaan Bahan baku sektor industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
587	Jumlah penggunaan Energi Sektor industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
588	Jumlah produksi sektor industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
589	Perkembangan Infrastruktur Kawasan Industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
590	Utilisasi Industri Pengolahan Non migas	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
591	Utilisasi Kawasan Industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Semesteran	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. Permenperin No. 2 Tahun 2019
592	Identitas Peralatan Bergerak Internasional(International Mobile Equipment Identity (IMEI))	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi	Tahunan	Permenperin No. 65 Tahun 2016
593	IKM alas kaki yang mendapatkan bimbingan teknis	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
594	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM yang memanfaatkan penjualan online	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
595	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
596	IKM yang memanfaatkan penjualan online	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
597	IKM yang memanfaatkan perbaikan kemasan dan perlindungan merk	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan; Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
598	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	Kementerian Perindustrian	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan; IAKSK; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
599	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi (Indonesia Food Innovation)	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
600	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)	Kementerian Perindustrian	Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
601	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi melalui Bali Creative Industry Center	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
602	Jumlah IKM yang memperoleh membership ecommerce ekspor (verified) membership ecommerce ekspor (verified)	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
603	Jumlah IKM yang memperoleh membership ecommerce ekspor (verified) sektor Industri Aneka	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
604	Jumlah Tenant Inkubator Bisnis	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
605	Pendaftaran NIB oleh kelompok usaha / unit bisnis di Pondok Pesantren	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
606	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Yang Mendapat Fasilitas	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
607	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
608	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitas	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
609	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
610	Sertifikat Produk IKM	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
611	Sertifikat Produk IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan, Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
612	Sertifikat Produk IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Kementerian Perindustrian	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
613	Sertifikat Bagi IKM	Kementerian Perindustrian	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
614	Big Data Industri	Kementerian Perindustrian	Pusat Data dan Informasi; Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Tahunan	PP No. 2 Tahun 2017
615	Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Kementerian Perindustrian	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tahunan	PP No. 29 Tahun 2018
616	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Kawasan Industri Rencana skala 1:50.000	Kementerian Perindustrian	Direktorat Perwilayahan Industri	Ad Hoc	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
617	Rasio elektrifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
618	Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5 Tahunan	Permen KKP No. 6 Tahun 2017
619	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	Kementerian Pertanian	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	5 Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
620	Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
621	Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Hortikultura	Tahunan	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
622	Peta Tanah Semi-Detail skala 1:50.000	Kementerian Pertanian	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Ad Hoc	1. Perpres No. 23 Tahun 2021; 2. SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
623	Luas Areal perkebunan kelapa sawit bersertifikasi ISPO di kabupaten	Kementerian Pertanian	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
624	Jumlah kelompok tani di kabupaten	Kementerian Pertanian	Pusat Penyuluhan Pertanian	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
625	Jumlah penyuluh di kabupaten	Kementerian Pertanian	Pusat Penyuluhan Pertanian	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
626	Jumlah Petani Perkebunan Rakyat di Kabupaten untuk 16 Komoditas Utama Perkebunan	Kementerian Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
627	Jumlah Petani Perkebunan Rakyat yang Memiliki STDB di beberapa kabupaten untuk 16 komoditas utama perkebunan	Kementerian Pertanian	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
628	Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Petani Perkebunan Rakyat di Kabupaten	Kementerian Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
629	Luas Areal Perkebunan Rakyat 16 Komoditas Utama Perkebunan di Kabupaten	Kementerian Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
630	Luas Areal Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit di Kabupaten	Kementerian Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
631	Luas Areal Perkebunan yang Dikelola Petani Perkebunan Rakyat di Kabupaten untuk 16 Komoditas	Kementerian Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	1. RPJMN 2020-2024; 2. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021
632	Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultural yang teregistrasi	Kementerian Pertanian	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
633	Jumlah Orang (Pemuda Perdesaan) yang didukung dan dilatih untuk mengembangkan usaha	Kementerian Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
634	Jumlah peserta pelatihan bagi petani milenial	Kementerian Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
635	Jumlah Wirausaha Muda Pertanian yang ditumbuhkan	Kementerian Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
636	Peta Cetak Sawah Indonesia skala 5:000	Kementerian Pertanian	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Tahunan	Perpres No. 23 Tahun 2021
637	Persentase luas sawah beringasi	Kementerian Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
638	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Perkebunan	Tahunan	SK Kepala BIG No. 38 Tahun 2021
639	Jumlah Bantuan Benih Padi dan Jagung	Kementerian Pertanian	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
640	Calon Petani Calon Lapangan (CPLC)	Kementerian Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Direktorat Jenderal Hortikultura; Direktorat Jenderal Perkebunan; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
641	Jumlah alokasi pupuk bersubsidi	Kementerian Pertanian	Direktorat Pupuk dan Pesticida	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
642	Jumlah Bantuan Pemerintah Berupa Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Kementerian Pertanian	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
643	Jumlah Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Sistem Irigasi Perpompaan dan Perpipaan	Kementerian Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
644	Jumlah Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Kementerian Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
645	Jumlah Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Kementerian Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
646	Jumlah realisasi pupuk bersubsidi	Kementerian Pertanian	Direktorat Pupuk dan Pesticida	Tahunan	Tematik Program Strategis Nasional : Bansos
647	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Tahunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
648	Jumlah Data Perjalanan Dinas Luar Negeri	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
649	Jumlah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
650	Jumlah Keppres GTK	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
651	Jumlah Keppres Pejabat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Negara	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
652	Jumlah Keppres Pejabat Pemerintahan	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
653	Jumlah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
654	Jumlah Penerbitan Keppres dalam setahun	Kementerian Sekretariat Negara	Asisten Deputi Administrasi Hukum	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
655	Jumlah penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Harian	Permensesneg No. 17 Tahun 2016
656	Nilai pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Mingguan	1. Inpres No. 2 Tahun 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. RPJMN 2020-2024
657	Nilai pencadangan UMK dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Mingguan	1. Inpres No. 2 Tahun 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. RPJMN 2020-2024
658	Nilai transaksi PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Mingguan	1. Inpres No. 2 Tahun 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. RPJMN 2020-2024
659	Nilai transaksi UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Mingguan	1. Inpres No. 2 Tahun 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. RPJMN 2020-2024
660	Nilai transaksi e-Purchasing	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Mingguan	1. Inpres No. 2 Tahun 2022; 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; 3. RPJMN 2020-2024
661	Jumlah rancangan dokumen pendampingan penyusunan peraturan bupati/walikota tentang PBJP di Desa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
662	Jumlah Rancangan Norma/Standar/Peraturan/Model Dokumen/Kajian tentang kebijakan PBJP di Desa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
663	Jumlah Permohonan Perlindungan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
664	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
665	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Korupsi	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
666	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Lainnya	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
667	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
668	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
669	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penganiayaan Berat	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
670	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penyiksaan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
671	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Perdagangan Orang	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
672	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Terorisme	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Bulanan	UU No. 31 Tahun 2014
673	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpustakaan Nasional	Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Permendagri No. 18 Tahun 2020; 3. PP No. 13 Tahun 2019
674	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perpustakaan Nasional	Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	Tahunan	1. Rencana Kerja Pemerintah 2022; 2. Permendagri No. 18 Tahun 2020; 3. PP No. 13 Tahun 2019
675	Data Persebaran Lokasi Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan	PP No. 3 Tahun 2014
676	Data Persebaran Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan	PP No. 3 Tahun 2014
677	Data Pengembangan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
678	Data Pengembangan BUM Desa Bersama di Daerah Tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
679	Data Pengembangan BUM Desa Bersama di Kawasan Perdesaan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
680	Data Bantuan Kewirausahaan Desa dan Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022
681	Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Tahunan	Pemendesa PDTT No.2 Tahun 2016
682	Data Bantuan Desa Wisata	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tahunan	Pemendesa PDTT No.2 Tahun 2016
683	Data Bantuan Pembangunan Embung	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tahunan	Inpres No. 1 Tahun 2018
684	Data Layanan Penurunan Stunting	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Periodik	Perpres No. 72 Tahun 2021
685	Data Progres Realisasi Penggunaan Dana Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Harian	1. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021; 2. Pemendesa PDTT No. 7 Tahun 2021; 3. Pemendesa PDTT No. 21 Tahun 2020; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018
686	Data Pemanfaatan DD untuk Sarana dan Prasarana	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Harian	1. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021; 2. Pemendesa PDTT No. 7 Tahun 2021; 3. Pemendesa PDTT No. 21 Tahun 2020; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018
687	Data Pemanfaatan DD untuk Non Sarana dan Prasarana	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Harian	1. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021; 2. Pemendesa PDTT No. 7 Tahun 2021; 3. Pemendesa PDTT No. 21 Tahun 2020; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas
688	Data Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Harian	1. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021; 2. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021; 3. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018
689	Data BLT DD	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Harian	1. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021; 2. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021; 3. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020; 4. Permendagri No. 20 Tahun 2018
690	Data Kerjasama Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Tahunan	Permendesa PDTT No.15 Tahun 2020
691	Data Fasilitas Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Tahunan	Permendesa PDTT No.15 Tahun 2020
692	Data calon transmigrasi yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tahunan	PP No. 3 Tahun 2014
693	Data Indeks Daerah Tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal	Eventual	Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2020